

**EFEKTIVITAS RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2009-2014
(Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupert,
dan Kecamatan Rupert Utara)**

Qory Kumala Putri
dan
M.Y. Tiyas Tinov

Abstrack

Recess is a two-way communication between the legislative work with the public through periodic visits. While the recess is a time of activity Legislative Council (DPRD) outside activities during the trial and outside the parliament building. Carried recess for three (3) times a year or 14 times a recess in the period of 5 years term Legislative Council (DPRD) .

The purpose of this study was to determine the implementation of the recess Members of Parliament (DPRD) Bengkalis 2009-2014 period, especially in the first electoral district san to determine the factors supporting and inhibiting the implementation of recess Members of Parliament (DPRD) Bengkalis Period 2009-2014 , especially in the electoral district I. This research was conducted in villages in the District Bantan, District Bengkalis, District Rupert, and District of North Rupert Bengkalis Riau Province. This type of research is a descriptive writer is trying to portray the facts with express and describe the symptoms to fully studied in the research aspect. So this study sought to discover phenomena that occur in the field. While the methods I use in this study is qualitative and quantitative methode. Sampling method in the study ni is purposive sampling method . While the data collection methods used were interviews, questionnaires, and documentation.

The conclusion of this research is undertaken in recess Bengkalis's members were effective in absorbing the aspirations of the people in the constituency. It can be seen from the results of measurements by the author using liqueur scale, where the number of scores obtained from the study were 957 or 68.36%, of which 100% is expected. Thus, based on data obtained from 8 and 35 question questionnaire respondents, the average percentage of 68.36% or 957 to be effective in the category, where the effective percentage is 61% -80%. It can be seen that the factors supporting the implementation of local legislators recess Bengkalis especially on the selection of author, namely: the Fund recess provided and Public participation. Meanwhile, the results of interviews conducted by the author with the respondent factors inhibiting the implementation of local legislators recess Bengkalis especially on the selection of I, namely: opinion Expenditure Budget (budget) is limited, the limited meeting time, lack of facilities Bengkalis parliament, and parliament Member flurry Bengkalis.

Key word : Recess, Members of Parliament, Bengkalis Regency.

Pendahuluan

Pada tahun 2013, meminjam istilah sejumlah politisi, bangsa Indonesia memasuki tahun politik. Namun ada juga politisi menyebutnya sebagai tahun kerja atau saatnya untuk berbicara lugas dan memberi tahu konstituen bahwa dirinya masih layak untuk dipilih sebagai wakil rakyat pada pemilihan umum yang diadakan pada tahun 2014.

Tahun ini dan awal tahun depan, dimanfaatkan dan digunakan oleh para anggota legislatif (wakil rakyat) untuk turun kekonstituen masing-masing dengan menggunakan masa reses. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencitraan diri, dengan cara berkomunikasi dan menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing, serta berusaha memperjuangkannya dalam bentuk anggaran.

Masa reses merupakan agenda rutin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Selain itu, reses juga menjadi sesuatu yang ditunggu para wakil rakyat. Selain jadi waktu istirahat, masa reses juga dapat dimanfaatkan untuk bertemu keluarga jauh maupun dekat di kampung halaman dan bisa juga dimanfaatkan untuk bertemu dengan masyarakat di daerah pemilihannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, reses para dewan dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan di daerah yang diwakilinya. Sedangkan reses adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat, setelah itu disidangkan sebelum aspirasi itu diusulkan ke dalam program pemerintah yang diwakilinya.

Melalui reses, para wakil rakyat yang bersidang di gedung milik rakyat dapat mengetahui secara lebih detail kondisi masyarakat di daerahnya, sehingga pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, reses juga dilakukan untuk memaksimalkan kinerja anggota dewan.

Permasalahan yang sering disampaikan masyarakat pada saat anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada saat melakukan reses yaitu mengenai pembangunan fasilitas umum. Adapun yang menjadi aspirasi masyarakat terhadap hal ini adalah: (1) Masyarakat memohon pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan bastek, (2) Masyarakat meminta pemerintah melakukan pengawasan pembangunan dengan cara turun langsung kelapangan, (3) Masyarakat meminta kepada pemerintah agar pembangunan jalan tolong diperhatikan, (4) Masyarakat meminta kepada pemerintah daerah agar meninjau kembali proyek infrastruktur jalan yang semakin buruk dan belum terealisasi dengan baik walaupun sampai akhir tahun, (5) Masyarakat meminta pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah daerah menyentuh pada aspek perekonomian masyarakat, (6) Masyarakat memohon peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah, (7) Masyarakat memohon pembangunan jaringan distribusi listrik, dan (8) Masyarakat meminta pemasangan lampu penerangan jalan untuk keperluan masyarakat. (laporan Reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan I)

Sementara itu, yang menjadi aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan I saat reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis khususnya masalah pendidikan adalah: (a) Masyarakat meminta pembangunan rumah sekolah lebih diperhatikan, (b) Meminta DPRD Kabupaten Bengkalis meninjau sarana dan prasarana di setiap

sekolah khususnya di daerah pemilihan I tersebut, (c) Meminta DPRD Kabupaten bengkalis memperhatikan sekolah-sekolah yang rusak, (d) Masyarakat meminta kepada pemerintah untuk menyediakan pendidikan untuk anak-anak (PAUD) secara gratis, karena masih banyak anak-anak yang tidak sekolah diusia dini, (e) Masyarakat memohon bantuan sumur bor untuk keperluan sekolah. (laporan Reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan I).

Sedangkan yang disampaikan masyarakat pada saat reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, khususnya masalah peningkatan perekonomian masyarakat meliputi, yaitu: (1) Masyarakat meminta agar dalam penerimaan tenaga kerja baik itu pada pemerintah dan swasta lebih memperhatikan putra daerah yang benar-benar memiliki potensi, (2) Bantuan yang diberikan kepada masyarakat supaya diberikan kepada yang berhak menerimanya, (3) Masyarakat meminta adanya pelatihan-pelatihan bagi ibu-ibu rumah tangga dalam program kegiatan perempuan, agar dapat meningkatkan taraf perekonomian keluarga, dan (4) Masyarakat memohon bantuan model usaha bagi rakyat kecil untuk meningkatkan usaha. (laporan Reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan I).

Beberapa aspirasi masyarakat di atas sangat disayangkan bila tidak terealisasi dengan baik, karena wakil rakyat di daerah pemilihan (dapil) I ini cukup besar yaitu 13 orang dari lima daerah pemilihan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Seharusnya dengan wakil sebanyak ini aspirasi masyarakat dapat disalurkan dengan baik dan bukan hanya untuk didengar tetapi juga untuk direalisasikan.

Disamping itu, para anggota dewan hendaknya mampu merubah persepsi masyarakat tentang kurang efektifnya reses yang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bengkalis dalam menampung aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan masalah yang diadukan masyarakat hanya ditampung dan dijawab secara diplomatis dari anggota dewan yang melakukan reses, sehingga masyarakat merasa hanya dijanji-janjikan saja tanpa ada aksi atau tindakan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Landasan Teori

Menurut Sondang P. Siagian (2000:72), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Menurut Miriam Budiharjo (2008:322), parlemen yang berada di daerah atau yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah. Anggota DPRD dipilih langsung oleh masyarakat pada saat pemilihan umum (Pemilu). DPRD terbagi atas dua, yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Fungsi dari DPRD sama dengan fungsi DPR, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 40, menjelaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, Pasal 42 ayat (1) menjelaskan tugas dan wewenang DPRD meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Membentuk peraturan daerah (perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- b. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan tentang pelaksanaan perda, dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD propinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
- i. Membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah.
- j. Memberikan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.
- k. Memberi persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Menurut Muslimah Hanim (2007:21) yang dimaksud dengan perwakilan (*representatif*) adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk membicarakan dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representative*).

Muslimah Hanim (2007:33-34) menjelaskan bahwa pada umumnya perwakilan politik mempunyai kelemahan karena yang terpilih biasanya adalah orang-orang populer karena reputasi politiknya, akan tetapi belum tentu mempunyai kemampuan serta menguasai masalah-masalah teknis pemerintah, perekonomian, dan lain sebagainya. Sedangkan para ahli dalam bidang tersebut sukar terpilih melalui perwakilan politik ini.

Sedangkan menurut Hoogerwerf dalam Muslimah Hanin (2007:32-33) menjelaskan bahwa ada lima model atau tipe hubungan antara sang wakil dengan yang diwakilinya, yaitu:

1. Model utusan (*delegate*); di sini sang wakil bertindak sebagai yang diperintah atau kuasa usaha yang menjalankan perintah dari yang mewakilinya.
2. Model wali (*trustee*); di sini sang wakil bertindak sebagai orang yang diberikan kuasa atau orang yang memperoleh kuasa penuh dari yang mewakilinya.
3. Model *politicos*; di sini sang wakil kadang-kadang bertindak sebagai delegasi dan kadang-kadang bertindak sebagai kuasa penuh.
4. Model kesatuan; di sini anggota parlemen dilihat sebagai wakil seluruh rakyat.
5. Model penggolongan (*diversifikasi*); di sini anggota parlemen dilihat sebagai kelompok teritorial, kelompok sosial atau kelompok politik tertentu.

Zuhri (2012:3) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Sedangkan masa reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan yaitu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD perlu dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala dengan cara bertemu konstituen pada daerah pemilihannya masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah.

Tujuan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan (Zuhri, 2012:4).

Zuhri (2012:5) menjelaskan kegiatan reses sekurang-kurangnya ada 4 tahap yaitu:

- a. Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses.
- b. Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- c. Pelaksanaan Reses
- d. Rapat Paripurna pelaporan hasil reses.

Pembahasan

Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2009-2014 Khususnya Pada Daerah Pemilihan I

Pelaksanaan reses merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala dengan cara bertemu konstituen pada daerah pemilihannya masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat.

Dalam pelaksanaan reses, respon masyarakat berbeda-beda, ada yang beranggapan reses merupakan ajang kampanye terselubung yang dilakukan anggota dewan untuk memperoleh simpati dan dukungan masyarakat. Masyarakat juga beranggapan bahwa reses dilakukan untuk pencitraan diri anggota dewan agar terlihat dan terkesan baik dimata masyarakat.

Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Reses

Walaupun sebagian besar masyarakat berpikir negatif terhadap pelaksanaan reses, ada juga sebagian kecil masyarakat yang berpikiran positif, di mana masyarakat menganggap reses sebagai ajang mengenal wakil mereka di pemerintahan khususnya di legislatif. Selain itu, masyarakat juga beranggapan bahwa reses merupakan cara yang paling efektif menyampaikan atau menyalurkan aspirasi mereka agar dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan anggota dewan.

Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pelaksanaan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis khususnya pada daerah pemilihan I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1: Tanggapan Responden Tentang Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Khususnya pada Daerah Pemilihan I

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	3	8.57
2	Baik	19	54.29
3	Kurang Baik	10	28.57
4	Tidak Baik	3	8.57
5	Sangat Tidak Baik	0	-
Jumlah		35	100,00

Sumber: *Hasil Olahan Data Angket, 2013*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang respon masyarakat terhadap pelaksanaan reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Khususnya pada Daerah Pemilihan I, di mana dari 35 orang responden, mayoritas responden menjawab baik yaitu 19 orang responden atau 54,29%. Adapun yang menjadi latar belakang responden menjawab baik, karena saat diadakan reses oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis tingkat kehadiran masyarakat tinggi.

Tingginya tingkat kehadiran masyarakat saat diadakan reses oleh Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (1) Ingin mengenal wakil mereka di DPRD Kabupaten Bengkalis, (2) Meminta kepada anggota dewan memperjuangkan pembangunan fasilitas umum di desanya, (3) Meminta anggota dewan mengawasi pembangunan di desanya agar sesuai dengan perencanaan, dan (4) Mengusulkan kepada anggota dewan supaya penerimaan tenaga kerja baik itu di organisasi pemerintah maupun di perusahaan swasta lebih mengutamakan putra daerah Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan aspirasi yang disampaikan masyarakat saat anggota dewan melakukan reses adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur jalan.
2. Peningkatan untuk sarana dan prasarana rumah ibadah
3. Pembangunan jaringan distribusi listrik
4. Pembuatan sumur bor
5. Pembangunan waduk untuk irigasi persawahan
6. Masyarakat meminta bantuan sosial untuk usaha kecil bagi masyarakat kelurahan tanjung kapal Kecamatan Rupert. (Laporan Hasil Reses Milsyadi, S.HI Tanggal 26 s/d 31 Desember 2012)

Tindakan-Tindakan Yang Dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Merealisasikan Aspirasi Masyarakat

Dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis perlu melakukan tindakan-tindakan yang tepat, salah satu tindakan-tindakan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis adalah dengan cara melaporkan hasil pertemuan reses ke Bupati Kabupaten Bengkalis dan Kepala Dinas yang berwenang di Kabupaten Bengkalis, agar harapan dan permintaan masyarakat kepada pemerintah dapat dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang tindakan-tindakan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam merealisasikan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2: Tanggapan Responden Tentang Bagaimana Tindakan-Tindakan Yang Dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Merealisasikan Aspirasi Masyarakat di Daerah Pemilihan I

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	5	14.29
2	Baik	16	45.71
3	Kurang Baik	8	22.86
4	Tidak Baik	5	14.29
5	Sangat Tidak Baik	1	2.86
Jumlah		35	100.00

Sumber: *Hasil Olahan Data Angket, 2013*

Pada tabel 3.2 di atas, terlihat jelas bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam merealisasikan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan I sudah baik, hal ini dapat diketahui dari 35 orang responden, mayoritas responden yaitu 16 orang responden atau 45,71% menjawab baik. Adapun alasan responden menjawab baik, karena sebagian besar permintaan masyarakat saat anggota dewan saat melakukan reses terealisasi dengan baik, khususnya pembangunan infrastruktur jalan.

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis khususnya Daerah Pemilihan I dalam merealisasikan setiap aspirasi masyarakat dapat diketahui dari wawancara yang penulis lakukan dengan Abul Kadir, S.Ag. Dari wawancara tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut, yaitu:

1. Anggota dewan akan membuat laporan hasil reses untuk disampaikan kepada Bupati Kabupaten Bengkalis dan Dinas yang berwenang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Anggota dewan mengusulkan aspirasi atau permohonan masyarakat pada sidang paripurna penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Anggota dewan melakukan lobi-lobi politik dengan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya agar menyetujui aspirasi masyarakat yang ditampungnya saat reses (Kamis, 3 Oktober 2013).

Peran Serta Masyarakat Terhadap Reses Yang Dilakukan Anggota DPRD

Peran serta masyarakat tidak hanya diukur dengan kemauan masyarakat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi dengan ada tidaknya hak masyarakat untuk ikut menentukan arah dan tujuan pembangunan-pembangunan dan juga diukur ada tidaknya kemauan masyarakat untuk secara mandiri untuk melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Untuk mengetahui partisipasi ataupun peran serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya melalui reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis khususnya pada daerah pemilihan I dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3: Tanggapan Responden Tentang Peran Serta Masyarakat Daerah Pemilihan I Terhadap Reses Yang Dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	10	28.57%
2	Baik	25	71.43%
3	Kurang Baik	0	-
4	Tidak Baik	0	-
5	Sangat Tidak Baik	0	-
Jumlah		35	100.00%

Sumber: *Hasil Olahan Data Angket, 2013*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang peran serta masyarakat daerah pemilihan I terhadap reses yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, di mana dari 35 orang responden, mayoritas responden menjawab baik yaitu 25 orang responden atau 71,43%. Adapun yang menjadi latar belakang responden menjawab sangat baik, karena saat diadakan reses oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis seluruh masyarakat yang hadir menyampaikan keinginannya atau aspirasinya.

Manfaat Reses Terhadap Pembangunan Infrastruktur

Banyaknya aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD ketika masa reses harus diatasi dengan lebih memfokuskan kepada hal-hal yang menjadi prioritas. Semua aspirasi dari masyarakat merupakan informasi yang berguna bagi pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang membuat semua aspirasi dari masyarakat tidak terpenuhi.

Salah satu pembangunan yang sering menjadi permintaan masyarakat saat diadakan reses adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Untuk mengetahui manfaat reses yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap pembangunan infrastruktur pada daerah pemilihan I dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4: Tanggapan Responden Tentang Manfaat Reses yang Dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Daerah Pemilihan I

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	5	14.29%
2	Baik	20	57.14%
3	Kurang Baik	8	22.86%
4	Tidak Baik	1	2.86%
5	Sangat Tidak Baik	1	2.86%
Jumlah		35	100.00%

Sumber: Hasil Olahan Data Angket, 2013

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa manfaat reses yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap pembangunan infrastruktur pada daerah pemilihan I baik, hal ini dapat diketahui dari 35 orang responden, mayoritas responden yaitu 20 orang responden atau 57,14% menjawab baik. Adapun alasan responden menjawab baik, karena sebagian besar aspirasi atau permintaan yang diajukan masyarakat (khususnya masalah pembangunan jalan dan jembatan) kepada anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang melakukan reses dapat terlaksana (terrealisasi) dengan baik atau sesuai dengan harapan masyarakat saat mengikuti acara reses anggota DPRD tersebut.

Sedangkan yang menjadi masalah di masyarakat setelah disetujuinya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis saat pengerjaan, sehingga pembangunan-pembangunan yang diharapkan masyarakat kurang dapat dimanfaatkannya. Hal ini disebabkan bangunan-bangunan baru yang dibangun pemerintah kurang memenuhi standar dan mudah rusak.

Manfaat Reses Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Untuk mengetahui secara jelas tanggapan responden tentang manfaat reses yang dilaksanakan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di daerah pemilihan I dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5: Tanggapan Responden Tentang Manfaat Reses yang Dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Daerah Pemilihan I

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	3	8.57
2	Baik	15	42.86
3	Kurang Baik	7	20.00
4	Tidak Baik	9	25.71
5	Sangat Tidak Baik	1	2.86
Jumlah		35	100,00

Sumber: Hasil Olahan Data Angket, 2013

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang manfaat reses yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap pembangunan ekonomi masyarakat di daerah pemilihan I, di mana dari 35 orang responden, mayoritas responden menjawab baik yaitu 15 orang responden atau 42,86%. Adapun yang melatar belakangi responden menjawab baik, karena program-program yang disampaikan DPRD Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu program yang disampaikan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis saat reses adalah pemberian bantuan bibit kelapa sawit kepada masyarakat dan pemberian subsidi pupuk kepada petani serta bantuan alat penangkap ikan buat para nelayan. Dengan program-program tersebut, masyarakat yang memiliki mata pencarian sebagai petani dan nelayan terbantu ekonominya.

Manfaat Reses Terhadap Peningkatan Pendidikan

Reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis juga menampung aspirasi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Peningkatan pendidikan yang dimaksud seperti peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, mutu pendidikan, serta kualitas guru yang mengajar. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap manfaat reses terhadap peningkatan pendidikan di daerah pemilihan I dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6: Tanggapan Responden Tentang Manfaat Reses yang Dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Terhadap Peningkatan Pendidikan di Daerah Pemilihan I

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	2	5.71
2	Baik	15	42.86
3	Kurang Baik	10	28.57
4	Tidak Baik	5	14.29
5	Sangat Tidak Baik	3	8.57
Jumlah		35	100,00

Sumber: Hasil Olahan Data Angket, 2013

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang tanggapan responden tentang manfaat reses yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap peningkatan pendidikan di daerah pemilihan I, di mana dari 35 orang responden, mayoritas responden menjawab baik yaitu 15 orang responden atau 42,86%. Adapun yang menjadi latar belakang responden menjawab baik, karena saat diadakan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis selalu memprioritaskan kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat menunjang mutu pendidikan.

Kemudian dari wawancara yang penulis lakukan dengan Puboyo, SE yaitu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan I, tentang manfaat reses terhadap pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan pada daerah pemilihan I Kabupaten Bengkalis, diperoleh jawaban, yaitu:

Reses sangat terasa manfaatnya terhadap pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan. Hal ini disebabkan anggota dewan turun langsung ke masyarakat sehingga apa saja keinginan masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan dapat di salurkan secara langsung. Selain itu, dengan kehadiran anggota dewan di suatu daerah saat melakukan reses membuat anggota dewan mengetahui bagaimana infrastruktur jalan, jembatan, keadaan ekonomi masyarakat (mata pencarian masyarakat), dan sarana pendidikan di daerah yang dikunjunginya (Jumat, 5 Oktober 2013)

Kelengkapan Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan Reses

Disisi lain, kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD membutuhkan biaya yang besar. Biaya-biaya tersebut digunakan untuk kelengkapan fasilitas-fasilitas pelaksanaan kegiatan reses. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang kelengkapan fasilitas-fasilitas pelaksanaan reses dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7: Tanggapan Responden Tentang Kelengkapan Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Khususnya Pada Daerah Pemilihan I (Seperti: Gedung, Tenda, Kursi, Meja, dan Pengeras Suara)

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	3	8,57
2	Baik	3	8,57
3	Kurang Baik	13	37,14
4	Tidak Baik	7	20,00
5	Sangat Tidak Baik	9	25,71
Jumlah		35	100,00

Sumber: Hasil Olahan Data Angket, 2013

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang kelengkapan fasilitas pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada daerah pemilihan I, di mana dari 35 orang responden, mayoritas responden menjawab kurang baik yaitu 13 orang responden atau 37,14%. Adapun yang melatar belakangi responden menjawab kurang baik, karena saat anggota DPRD Kabupaten Bengkalis mengadakan reses fasilitas-fasilitas yang disediakan hanya seadanya atau terkadang kegiatan reses hanya diadakan di tenda-tenda yang disewa bukan di dalam gedung.

Ketersediaan Waktu Menyampaikan Aspirasinya Saat Reses

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang ketersediaan waktu yang diberikan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Kepada Masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya saat reses, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8: Tanggapan Responden Tentang Ketersediaan Waktu Yang Diberikan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Kepada Masyarakat Untuk Menyampaikan Aspirasinya Saat Reses

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	3	8,57
2	Baik	7	20,00
3	Kurang Baik	21	60,00
4	Tidak Baik	3	8,57
5	Sangat Tidak Baik	1	2,86
Jumlah		35	100,00

Sumber: *Hasil Olahan Data Angket, 2013*

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang ketersediaan waktu yang diberikan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Kepada Masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya saat reses di daerah pemilihan I, di mana dari 35 orang responden, mayoritas responden menjawab kurang baik yaitu 21 orang responden atau 60,00%. Adapun yang melatar belakangi responden menjawab kurang baik, karena kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis hanya 4-5 jam saja, sehingga kesempatan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya kurang cukup.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Reses

Pelaksanaannya kegiatan reses harus di dukung oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan I yaitu Pirzal Fudoil, diperoleh jawaban bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan reses yaitu:

- (1) Dana reses yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis. Adapun besar dana yang diberikan kepada setiap anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Saat melakukan reses adalah Rp. 30.000.000.
- (2) Peran serta masyarakat di Kabupaten Bengkalis dalam mengikuti dan menghadiri kegiatan reses (Rabu, 5 Oktober 2013).

Dana bantuan reses yang diberikan kepada setiap anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, sering digunakan DPRD Kabupaten Bengkalis sebagai bantuan sosial kemasyarakatan, seperti bantuan rumah ibadah, bantuan perlengkapan ibu-ibu pengajian (wirid), dan bantuan perlengkapan oleh raga remaja di desa tempat di adakan reses. Dana bantuan reses yang diperoleh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis juga dipergunakan untuk keperluan kegiatan pelaksanaan reses yang akan dilaksanakan, seperti: menyewa ruangan/tenda, konsumsi, dokumentasi, dan transportasi. Menurut Indra Gunawan (anggota DPRD Kabupaten Bengkalis) dana yang diberikan kepada setiap anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sudah cukup untuk memenuhi kelengkapan kegiatan reses. Namun yang sering menjadi kendala adalah masyarakat banyak mengajukan proposal bantuan kepada anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, sehingga anggota DPRD Kabupaten Bengkalis harus memakai dana pribadinya.

Selain dana reses, faktor lain yang mendukung kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis adalah peran serta masyarakat dalam mengikuti kegiatan reses. Hal ini merupakan faktor pendukung karena

tanpa dukungan masyarakat kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tidak akan memperoleh hasil yang baik, karena yang tau permasalahan di masyarakat dan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat hanya masyarakat tersebut yang lebih tau.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Reses

Setelah mendapatkan informasi ketika melakukan reses anggota DPRD akan mengawal aspirasi tersebut sampai pada tahap pembahasan dengan pihak pemerintah daerah. DPRD juga akan memperjuangkan setiap informasi dan keinginan dari masyarakat dapat berbuah menjadi sebuah kebijakan, karena masyarakat akan kecewa bila keinginannya tidak menjadi sebuah kebijakan. Itulah tugas berat DPRD untuk memperjuangkannya. Maka dari itu, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2004-2009 hendaknya dapat berperan aktif dalam mengemban tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan masyarakat pemilih kepadanya.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Abdul Kadir, S.Ag dapat diketahui bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis khususnya pada daerah pemilihan I, yaitu:

Dana APBD Kabupaten Bengkalis yang terbatas. Sedangkan ketika anggota dewan turun menemui masyarakat, banyak masyarakat yang menuntut agar apa yang disampaikan saat reses harus lahir menjadi sebuah kebijakan yang harus segera dilaksanakan. Kami sebagai anggota dewan tidak enak hati jika menolak secara langsung permintaan masyarakat. Walaupun pada akhirnya banyak permintaan masyarakat yang tidak terpenuhi ketika membahas APBD bersama pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, dan masyarakat akan menuntut ketika reses berikutnya (Kamis, 3 Oktober 2013).

Terbuang aspirasi masyarakat ketika dalam perumusan kebijakan publik dalam APBD Kabupaten Bengkalis disebabkan kemampuan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terbatas untuk merealisasikan semua keinginan dari masyarakat.

Banyaknya permintaan masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan ketika masa reses, membuat pemerintahan kabupaten harus membuat strategi guna menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat, karena permintaan masyarakat yang paling utama disampaikan kepada anggota dewan adalah seputar pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik memerlukan dana yang besar untuk direalisasikan. Pembangunan jalan, sekolah, jembatan, serta sarana pelengkap lainnya memerlukan program jangka panjang untuk menyelesaikannya. Banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan apa yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten dengan dana yang terbatas.

Aspirasi masyarakat yang didapatkan ketika masa reses diteruskan untuk menjadi sebuah kebijakan publik dengan perhitungan yang tepat. Banyaknya aspirasi masyarakat tidak sebanding dengan kemampuan dari pemerintah kabupaten untuk merealisasikannya. Kemampuan pemerintahan daerah yang terbatas dalam merealisasikan aspirasi masyarakat mengharuskan pemerintahan daerah mengambil langkah skala prioritas dalam merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Sementara itu, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Sofyan, S.Pd.I diperoleh jawaban bahwa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, yaitu:

1. Waktu pertemuan yang terbatas, dimana waktu reses hanya 6 hari dan dibagi kedalam beberapa kecamatan membuat reses berjalan kurang baik. Keterbatasan anggota dewan bertemu dengan masyarakat menyebabkan banyak aspirasi masyarakat yang kurang tertampung seluruhnya
2. Terbatasnya sarana yang dimiliki DPRD Kabupaten Bengkalis menyebabkan aktivitas reses yang dilakukan anggota DPRD relatif terbatas untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang terisolir di sekitar Kabupaten Bengkalis. Apalagi transportasi di Kabupaten Bengkalis terdiri dari darat dan laut.
3. Kesibukan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Kesibukan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas rutin dan formal dengan agenda yang padat seperti menghadiri pertemuan resmi, sidang-sidang DPRD, kunjungan kerja, studi banding, serta kegiatan meningkatkan kualitas SDM seperti pelatihan, seminar dan sebagainya menyebabkan mereka hampir tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. Hal ini sering dikeluhkan oleh anggota DPRD bahwa apa bila tidak masa reses mereka tidak sempat menjalin komunikasi dengan masyarakat (Jumat, 2 Oktober 2013).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor-faktor penghambat pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis khususnya pada daerah pemilihan I adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas.
2. Waktu pertemuan yang terbatas
3. Terbatasnya sarana yang dimiliki DPRD Kabupaten Bengkalis.
4. Kesibukan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Efektivitas Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Periode 2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Bengkalis, Rupat, dan Rupat Utara), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis efektif dilakukan dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihnya. Hal ini dapat diketahui dari hasil pengukuran yang penulis lakukan dengan menggunakan skala liker, dimana jumlah skor yang diperoleh dari penelitian adalah 957 atau 68,36%, dari yang diharapkan yaitu 100%. Dengan demikian, berdasarkan data yang diperoleh dari 8 pertanyaan angket dan 35 orang responden, maka rata-rata 957 dengan persentase 68,36% berada pada kategori efektif, dimana persentase efektif yaitu 61%-80%.
2. Tindakan-tindakan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis khususnya Daerah Pemilihan I dalam merealisasikan setiap aspirasi masyarakat, yaitu: (1) Anggota dewan akan membuat laporan hasil reses untuk disampaikan kepada Bupati Kabupaten Bengkalis dan Dinas yang

- berwenang sesuai dengan aspirasi masyarakat, (2) Anggota dewan mengusulkan aspirasi atau permohonan masyarakat pada sidang paripurna penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, dan (3) Anggota dewan melakukan lobi-lobi politik dengan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya agar menyetujui aspirasi masyarakat yang ditampungnya saat reses (Kamis, 3 Oktober 2013).
3. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor pendukung pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis khususnya pada daerah pemilihan I, yaitu: (a) Dana reses yang diberikan kepada setiap anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 30.000.000,-, dan (b) Peran serta masyarakat di Kabupaten Bengkalis dalam mengikuti dan menghadiri kegiatan reses.
 4. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan responden maka faktor-faktor penghambat pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis khususnya pada daerah pemilihan I, adalah sebagai berikut: (a) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, (b) Waktu pertemuan yang terbatas, (c) Terbatasnya sarana yang dimiliki DPRD, dan (d) Kesibukan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswanto, Mariattang. 2007. *Tata Tertib DPRD Untuk Parlemen Yang Amanah*. Komite Pemantau Legislatif: Makassar
- Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muslimah Hanim. *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Pekanbaru: UIR Press, 2007.
- Nurmansyah. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik (Untuk Meraih Keunggulan Kompetitif Perusahaan)*. Unilak Press. Pekanbaru.
- Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT Raja Grasindo.
- Riduwan. 2005. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sondang. P Siagian. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. 2004. *Melode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Stephen P. Robbins, 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, Jakarta: Erlangga.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Undang-Undang nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- Zuhri. *Buku Panduan Reses*. Pangkal Pinang. 2012